

PENGARUH EFEKTIFITAS PENYUSUNAN DAN PENGUNAAN DAFTAR WAJIB PAJAK (MASTER FILE) , STRUKTUR ORGANISASI DAN PROSEDUR PERPAJAKAN DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA I

Hanifah

Abstract

Tax is one source of revenue that is essential for the administration and development. Tax revenues are used to finance the construction of which is useful for the common good. The government's commitment to not rely on foreign debt and oil revenues make tax revenue as the backbone of the government to finance its activities. The government's efforts to increase tax revenue is one done through reform of the tax system, particularly the modern tax administration. But this has not succeeded optimally, is seen where tax revenues are still far from the expected tax potential. So that no indication is still not optimal level of effectiveness of the preparation and use of a list of taxpayers (master file), organizational structure and taxation procedures performed in DJP Jakarta I. Thus the purpose of this study was to determine whether the effectiveness of the preparation and use of a list of taxpayers (master files), organizational structure and procedures of taxation effect on tax revenue either partially or simultaneously.

Based on the results of the study showed that the effectiveness of the preparation and use of a list of taxpayers (master file), organizational structure and procedures of taxation can be said to have been effective, but not optimal so that needs to be improved further. Then based on test results that the preparation and use of a list of taxpayers (master file), organizational structure and procedures of taxation influence simultaneously to tax revenues amounted to 79.77% and 20.23% influenced by other factors. Partially, each influential of 35.67%, 26.35% and 17.75%.

Keywords: *preparation and use of taxpayer list; structural organization; procedures taxation in modern tax administration*

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Komitmen pemerintah untuk tidak bergantung kepada utang luar negeri dan penerimaan migas menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan, khususnya administrasi

perpajakan modern. Namun hal ini belum berhasil secara optimal, ini terlihat dimana realisasi penerimaan pajak masih jauh dari potensi pajak yang diharapkan. Sehingga ada indikasi masih belum optimalnya tingkat efektifitas penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta I. Dengan demikian tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah efektifitas penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan dapat dikatakan sudah efektif, namun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Kemudian berdasarkan hasil pengujian bahwa penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak sebesar 79,77% dan 20,23% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan secara parsial masing-masing berpengaruh sebesar 35,67%, 26,35% dan 17,75%.

Kata kunci: penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, agar dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasar pada prinsip kemandirian. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Komitmen pemerintah untuk tidak bergantung kepada utang luar negeri dan penerimaan migas menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan pembaharuan reformasi pajak (*tax reform*) yang bertujuan agar sistem perpajakan yang berlaku saat ini mengalami penyederhanaan yang mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Disamping itu reformasi juga dilakukan terhadap aparat pajak (*fiskus*) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan. Hal ini dilakukan sejak tahun 1983 dengan melakukan perubahan sistem perpajakan yaitu dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Perubahan sistem perpajakan ini selanjutnya diikuti dengan penyempurnaan administrasi perpajakan melalui perubahan struktur organisasi dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989.

Pelaksanaan reformasi perpajakan ternyata mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan mencetak nilai surplus dari realisasi dibandingkan dengan target yang rencanakan. Namun peningkatan tersebut belum dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak tersebut telah optimal. Terlihat dari perbandingan perhitungan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (*potensi pajak teoritis*). Berdasarkan laporan audit kinerja Direktorat Jendral Pajak tahun 2004 disebutkan bahwa hasil perhitungan potensi pajak teoritis dikaitkan dengan realisasi penerimaan pajak

menunjukkan tingkat realisasi yang masih rendah dengan tingkat perbedaan (*gap*) yang cukup besar (tabel 1).

Tabel 1 Perkembangan *Tax Coverage Ratio* Periode 2000/2005

Periode	Penerimaan Pajak	Potensi pajak	Coverage ratio
2000	97.484,8	145.953,3	66.8%
2001	157.195,9	206.564,9	76.1%
2002	180.099,0	253.731,9	76.4%
2003	210.087,5	279.371,6	75.2%
2004	242.048,2	343.330,8	70.5%
2005	347.567,8	383.325,4	72,3%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak 2006

Penyebab *gap* yang paling dominan adalah masih lemahnya administrasi perpajakan (Chaizi Nasucha, 2003: 5). Hal ini sesuai dengan pernyataan IMF dalam laporan hasil penelitian Badan Analisis Keuangan dan Moneter yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak (1999: 14) yang menyebutkan adanya kelemahan dalam administrasi perpajakan. Selain itu diungkapkan juga oleh Bird and Jantscher (1992: 67) bahwa rendahnya kinerja perpajakan terutama disebabkan oleh administrasi perpajakan yang belum dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Menurut M. Zain (1991: 9) salah satu faktor prinsipal yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan penerimaan pajak adalah adanya perubahan kualitas dan efektivitas administrasi perpajakan.

Dengan adanya tuntutan akan penerimaan pajak tersebut, maka perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan pajak (M. Zain, 1991: 59). Dalam hal ini, administrasi perpajakan dituntut perannya dalam mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan pada waktu yang bersamaan harus menyediakan pelayanan yang optimal kepada publik yaitu wajib pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk perubahan kualitas dan efektivitas administrasi perpajakan, pemerintah menggulirkan program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang diwujudkan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Administrasi perpajakan modern memiliki ciri khusus yang membedakan dengan administrasi pajak konvensional antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, dibentuknya pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui *account representative* dan *complain center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru dengan merubah Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-payment*, *taxpayer account*, *e-registration* dan *e-counseling*.

Administrasi pajak modern pertama kali dilaksanakan dengan membentuk kantor khusus untuk mengadministrasikan wajib pajak yang memberikan sumbangan penerimaan pajak terbesar. Selanjutnya dikembangkan dengan pembentukan KPP Madya dan KPP Pratama pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I yang mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Badan tingkat Kanwil

Sasaran utama penerapan sistem administrasi pajak modern adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan peningkatan kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem

ini, bagi Wajib Pajak adalah (1) *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative*; (2) *certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP. Namun yang jadi permasalahan disini adalah apakah administrasi perpajakan modern yang diterapkan telah dijalankan secara efektif dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan utama dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dengan konsep dan tujuan yang telah dicanangkan dalam administrasi perpajakan modern diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun sebegitu apapun konsep dan tujuan yang akan dicapai tanpa diikuti dengan pelaksanaan yang efektif maka tidak ada jaminan untuk dapat tercapai tujuan tersebut. Efektivitas menurut para ahli (Gibson et.al, 1996; Mardiasmo, 2001) dapat dikatakan bahwa apakah semua prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan penerimaan pajak, administrasi pajak harus dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan fenomena, permasalahan, dan didukung oleh hasil penelitian (M.Zain, 1991; Chaizi Nasucha, 2003) serta yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tuntutan akan penerimaan pajak negara dan masih lemahnya administrasi perpajakan maka pemerintah melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan membentuk administrasi perpajakan modern. Selanjutnya apakah administrasi perpajakan modern tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif, karena tanpa pelaksanaan yang efektif tidak ada jaminan untuk dapat mencapai tujuan penerimaan pajak tersebut. Untuk itu, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih lanjut tentang efektifitas administrasi perpajakan modern yang dilakukan di Kanwil DJP Jakarta I yang telah mengimplementasikan administrasi pajak modern..

organisasi yang meliputi struktur pelayanan dan pemeriksaan, spesifikasi tugas dan tanggungjawab, monitoring pelayanan dan pemeriksaan, pelaksanaan tugas pelayanan dan pemeriksaan, serta prosedur perpajakan yang meliputi prosedur administrasi dan teknologi informasi modern. Namun ada dua variable yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yaitu strategi organisasi dan budaya organisasi, dengan alasan bahwa kedua variable tersebut berdasarkan hasil penelitian Chaizi Nasucha (2003) ternyata tidak signifikan.

Identifikasi Masalah

1. Apakah penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
2. Apakah penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I

Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara parsial terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.
3. Untuk mengetahui pengaruh penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

1. Bagi kalangan praktisi pajak, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam perumusan kebijakan dan pembenahan administrasi perpajakan khususnya penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak
2. Bagi kalangan akademisi, sebagai salah satu masukan referensi dalam upaya pengembangan penelitian yang lebih komprehensif terutama berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan modern yang meliputi penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi *budgetair* pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak (M. Zain, 2003: 22). Dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, faktor administrasi yang menjadi media untuk melaksanakan pemungutan pajak yang didukung dengan kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan ketentuan perundang undangan perpajakan (*tax law*) merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem perpajakan.

Dalam pelaksanaan sistem perpajakan tersebut selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan pajak tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang undang perpajakan (*tax law*) dan selanjutnya dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*) (M. Zain, 2003: 22)

Usaha untuk memperbaiki sistem perpajakan harus dilakukan secara terus menerus dan sistem tersebut selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi sekarang (*up to date*) atau disebut sebagai reformasi pajak (*tax reform*). Dalam pelaksanaan reformasi perpajakan, disamping modernisasi cara kerja, memelihara sistem perpajakan yang responsif dengan kondisi sekarang, juga bertugas mengoreksi kesalahan kesalahan yang terjadi dimasa lalu (M.Zain, 2003: 23).

Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi dengan pendekatan fiskal. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memperbaiki sistem, penegakan hukum dan administrasi perpajakan (Chaizi Nasucha, 2003: 37). Menurut Williamson dalam Mas'ood (1994: 60-61) reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pajak pada asset yang berada diluar negeri. Perubahan stuktur pajak (*tax base* dan *tax rate*) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

Bird dan Jantscher (1999)) menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman negara negara berkembang, ada tiga muatan pokok yang dibutuhkan untuk keberhasilan reformasi administrasi perpajakan: (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, struktur organisasi, prosedur, serta sumber daya finansial dan insentif yang cukup (Eke, 2001: 7). Sedangkan menurut Caiden (1991) reformasi administrasi perpajakan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

Langkah langkah modernisasi administrasi perpajakan ini mencakup (1) pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*, (2) perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta (3) prosedur perpajakan dengan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien.

Pada dasarnya administrasi perpajakan yang benar dimulai dengan program registrasi dimana diketahui berapa jumlah wajib pajak, baik wajib pajak potensial maupun wajib pajak efektif, begitu juga aktivitasnya dan sekaligus kekayaannya untuk kemudian dapat dijadikan bahan pembandingan dan mengevaluasi penghasilannya. Namun hendaknya diperhatikan juga bahwa daftar wajib pajak tersebut menjadi tidak berarti, apabila administrasi perpajakan tidak mengikuti perkembangan yang mutakhir dari wajib pajak yang termuat dalam daftar tersebut, seperti perubahan domisili, perubahan nama perusahaan pribadi atau badan, wajib pajak yang meninggalkan tanah air atau meninggal dunia, perusahaan yang dilikuidasi atau berkembangnya perusahaan dan lain sebagainya.

Perbaikan stuktur dan kelembagaan yang diterapkan pada sistem administrasi perpajakan modern, dimana struktur organisasi dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP. KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan banding, serta penyidikan.

Prosedur perpajakan dengan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini diupayakan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan. Adanya dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak dengan pengimplementasian Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemen kasus (*case management system*) dalam sistem pemantauan proses administrasi perpajakan (*workflow system*) mengacu pada otomasi kantor mencakup pelayanan, pengawasan pembayaran dan pemeriksaan dengan pengendalian proses, otorisasi, pengawasan pelaksanaan tugas serta pelaporan yang dirancang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Admnsitrasi perpajakan modern yang akan diteliti hanya difokuskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Moh Zain (1991), dan Chaizi Nasucha (2003) yang menurut hasil penelitian kedua peneliti tersebut adalah signifikan terhadap penerimaan pajak serta didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Mansyuri (1992). Dengan demikian maka variable-variabel yang diteliti adalah penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) dan struktur organisasi yang meliputi fungsi pelayanan dan pemeriksaan, spesifikasi tugas dan tanggungjawab, monitoring pelayanan dan pemeriksaan, pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan, serta prosedur perpajakan yang meliputi prosedur administrasi dan teknologi informasi modern.

Kemudian dilihat dari hubungan ketiga variabel tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara ketiga variabel, karena bila salah satu dari variable tersebut tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap variable lain, sehingga tujuan utama mengoptimalkan penerimaan pajak otomatis tidak akan tercapai. Sebaliknya jika ketiganya efektif saling mendukung satu sama lain maka akan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Hipotesis Penelitian

1. Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I

2. Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah penyusunan dan penggunaan *master file*, stuktur organisasi dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern serta penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta I. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diisi oleh pegawai pajak / aparat pajak yang berada dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta I. Penerimaan pajak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta I untuk periode tahun 2005.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu ekonomi khususnya perpajakan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif. Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*.

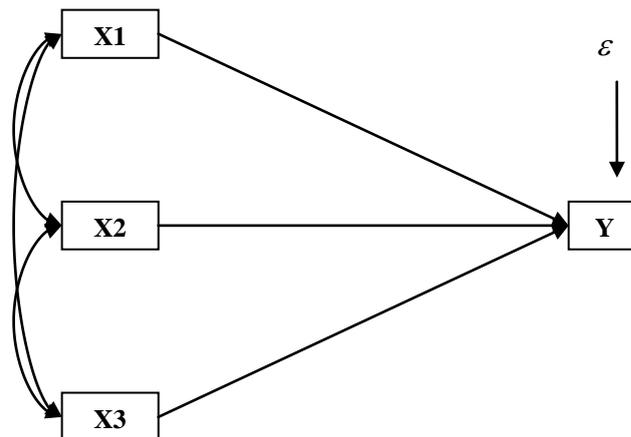
Operasional Variabel Penelitian terdiri dari variabel independen variabel independen yaitu penyusunan dan penggunaan *master file* dalam administrasi perpajakan modern (X_1), struktur organisasi dalam administrasi perpajakan modern (X_2), prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern (X_3). Sedangkan variabel dependen yaitu tingkat pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta I.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I. Banyaknya KPP yang melaksanakan administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil DJP Jakarta I adalah sebanyak 16 (enam belas) KPP. Kemudian untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan metode sensus sehingga semua populasi tersebut digunakan juga sebagai sampel penelitian. Selanjutnya banyaknya pegawai pajak diseluruh KPP yang termasuk dalam lingkup Kanwil DJP Jakarta I adalah sebanyak 1708, dari jumlah ini diambil sampel berdasarkan rumus Taro Yamane (M.Sudrajat, 2002), sehingga yang terpilih sebanyak 91,58 atau 92 responden yang kemudian di proporsionalkan menitur KPP.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sebelum kuesioner disebarakan terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan/ Pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian ini alat uji yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Pengujian ini dilakukan karena semua variabel independen secara konsep satu sama lain saling berhubungan (Sitepu, 1994: 2). Dari diagram jalur ini, dapat diartikan hubungan struktural antara $X_1, X_2,$ dan X_3 dengan Y merupakan hubungan kausal, karena panahnya berkepala satu dan ε merupakan unsur lain yang dalam penelitian ini diabaikan nilainya. Skala pengukuran baik pada variabel bebas maupun variabel tak bebas sekurang-kurangnya interval.

Gambar 1 Diagram Jalur



Selanjutnya hipotesa yang dikemukakan dapat dijabarkan dalam hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H_0 : penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) , struktur oraganisassi dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
- H_1 : penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur oraganisasi dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

HASIL ANALISIS

Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil uji validitas instrument penelitian yang dilakukan, korelasi skor setiap item dengan skor total variabel untuk setiap pernyataan yang digunakan pada variabel penelitian ini diperoleh hasil nilai yang lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini berarti bahwa setiap item pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian telah dapat mengukur variabel penelitian.

Setelah dilakukan uji reliabilitas dapat dilihat nilai koefisien yang diperoleh untuk setiap variable lebih besar dari nilai batas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel penelitian dapat dikatakan reliabel (nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,7). Dengan demikian, variabel dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Untuk menguji apakah *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan secara simultan atau parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I secara statistik hipotesis dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | $H_0 : \rho_{YX_i} = 0$ | Tidak terdapat pengaruh secara simultan penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (<i>master file</i>), struktur organisasi dan prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I |
| . | $i = 1,2,3$ | |
| 2 | $H_1 : \rho_{YX_i} \neq 0$ | Terdapat pengaruh secara simultan penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (<i>master file</i>), struktur organisasi dan prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I . |
| . | $i = 1,2,3$ | |

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji F, dengan ketentuan tolak H_0 jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan sebaliknya terima H_0 jika F_{hitung} lebih kecil atau sama dengan F_{tabel} .

Dari perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{Y(X_1, X_2, X_3)}}{k(1-R^2_{Y(X_1, X_2, X_3)})} = \frac{(16-3-1) \times 0,7977}{3 \times (1-0,7977)} = 15,770$$

Dari tabel F untuk tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas $db_1 = 3$ dan $db_2 = 16-3-1 = 12$, diperoleh $F_{0,05(3;12)} = 3,4903$

Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak pada tingkat signifikansi 0.05, jadi berdasarkan pada hasil pengujian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan atau simultan penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I

Setelah prosedur pengujian simultan H_0 ditolak, dan disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan, selanjutnya dilakukan pengujian individual untuk melihat kebermaknaan (*signifikansi*) pengaruh variabel independen (X_1, X_2 dan X_3) secara parsial terhadap variabel dependen (Y), maka dilakukan pengujian dengan uji t. Hipotesis yang diajukan adalah “*Master file* (X_1), Struktur organisasi (X_2) dan Prosedur perpajakan (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I (Y)”. Selanjutnya hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- 1 $H_0 : \rho_{YX1} = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif dari penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 $H_1 : \rho_{YX1} \neq 0$ Terdapat pengaruh positif dari penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
- 2 $H_0 : \rho_{YX2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif dari struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 $H_1 : \rho_{YX2} \neq 0$ Terdapat pengaruh positif dari struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
- 3 $H_0 : \rho_{YX3} = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif dari prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 $H_1 : \rho_{YX3} \neq 0$ Terdapat pengaruh positif dari prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I

Selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk $n = 16$ dengan taraf kesalahan 5% dan $dk = n-k-1 = 16-3-1=12$ adalah 2,1788

Hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial

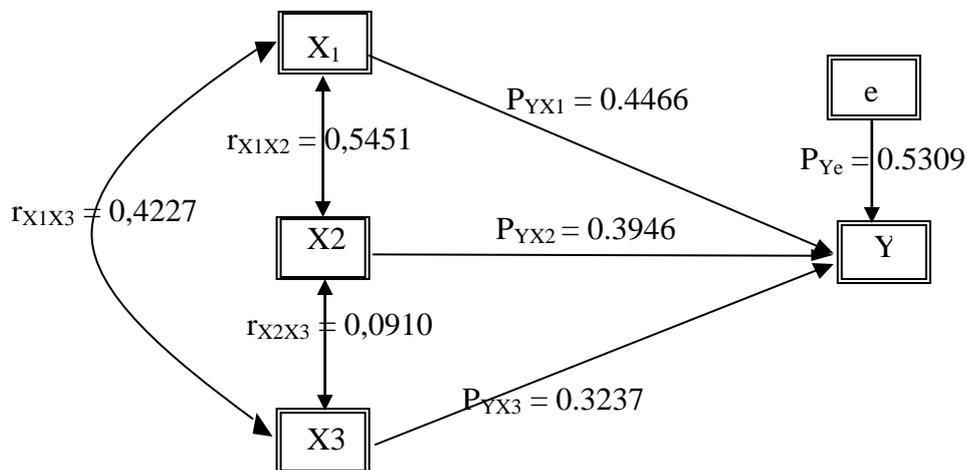
No	Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan Statistik
1	penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (<i>master file</i>) mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak	0.4466	2.5796	2.1788	H_0 ditolak terdapat pengaruh penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (<i>master file</i>) terhadap penerimaan pajak
2	Struktur organisasi	0.3946	2.504	2.1788	H_0 ditolak terdapat

No	Hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan Statistik
	berpengaruh terhadap penerimaan pajak		7		pengaruh struktur organisasi terhadap penerimaan pajak
2	Prosedur perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak	0.3237	2.2211	2.1788	H ₀ ditolak terdapat pengaruh prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak

Sumber : Data primer dan sekunder (diolah)

Dari hasil pengujian pada bagian di atas diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara simultan dan parsial variabel *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Adapun gambar hubungan X dengan Y adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Path Diagram Model Struktural Hubungan X dengan Y



Besar pengaruh secara simultan *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi yaitu 0,7977. Jadi diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini 79,77% penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dipengaruhi oleh penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan, sedangkan sisanya yang 20,23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Dapat dilihat bahwa kontribusi langsung struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah sebesar 15,57% dan pengaruh tidak langsung struktur organisasi terhadap penerimaan pajak yang melalui penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*Master file*) sebesar 9,61% serta yang melalui prosedur perpajakan sebesar 1,16%.

Total pengaruh struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah 26,35% dengan arah yang positif, yang berarti semakin tinggi struktur organisasi akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Total pengaruh prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah 17,75% dengan arah yang positif, yang berarti semakin

tinggi prosedur perpajakan akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Efektivitas penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), dimana secara keseluruhannya (dapat dilihat pada analisis data) termasuk dalam kategori efektif. Dari pernyataan yang diajukan sebagian besar responden menyatakan bahwa data master file yang ada di Kantor Wilayah DJP Jakarta I telah lengkap dan akurat. Hal ini dimungkinkan karena penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I telah berorientasi modern dengan bantuan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, wajib pajak di beberapa KPP yang termasuk dalam wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta I merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak sehingga jumlah wajib pajak yang terdaftar di setiap KPP jumlahnya relatif sedikit.

Efektivitas struktur organisasi di setiap KPP dalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta I termasuk kategori efektif. Struktur organisasi berkaitan dengan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan. Hal ini terlihat dalam penerapan admistrasi pajak modern di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dimana telah dilakukan pemisahan fungsi dan tugas yang jelas berdasarkan spesialis kerja yang dimiliki oleh petugas pajak. Selain itu, berdasarkan hasil survey jalur penyelesaian pelayanan mudah dan tidak kaku dalam pelaksanaannya. Adanya *account representative* yang telah berfungsi sebagai pintu komunikasi untuk wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan. Terlihat dari hasil jawaban kuseioner yang diberikan kepada responden bahwa Account Representative paham tentang bisnis dan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Namun satu hal yang menjadi catatan adalah perlu ditingkatkannya kuantitas dan pemerataan pelatihan teknis bagi aparat pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme. Dalam hal monitoring pelayanan dan pengawasan wajib pajak telah dilakukan melalui *taxpayer account* (rekening wajib pajak) yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, telah berjalan dengan baik sedangkan monitoring aparat pajak yaitu dengan memberikan sanksi dan penjatuhan hukuman telah dilaksanakan cukup tegas. Dengan demikian, secara keseluruhan menunjukkan bahwa struktur organisasi yang diterapkan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I telah efektif. Hal ini mempunyai pengertian bahwa apa yang telah digariskan dalam upaya pencapaian tujuan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I telah dilaksanakan.

Efektifitas prosedur perpajakan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini terlihat dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 8 indikator menyangkut prosedur perpajakan. Dimana dalam administrasi perpajakan modern di Kantor Wilayah DJP Jakarta I telah dilakukan penyederhanaan prosedur perpajakan dengan bantuan teknologi sehingga lebih memudahkan aparat pajak dan wajib pajak untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perpajakan.

Dengan adanya penyederhanaan prosedur perpajakan sebagian besar responden mengatakan bahwa telah terjadi efisiensi dalam meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Selanjutnya dengan adanya dukungan teknologi komputerisasi, berdasarkan hasil survey, dapat mempercepat dalam proses pelayanan dan pemeriksaan serta formulir yang digunakan menjadi lebih sederhana. Hal ini menyebabkan dalam hal waktu dan kuantitas pelayanan wajib pajak menjadi semakin tinggi. Namun disisi lain, perlu adanya peningkatan fasilitas yang lebih memadai, untuk menunjang pelaksanaan administrasi perpajakan modern. Menjadi lebih baik.

Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) adalah sebagai salah satu alat untuk memonitor wajib pajak yang berisi data subjek dan objek pajak. Master file merupakan data awal bagi instansi pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan uji t, diperoleh hasil bahwa Master

file dalam administrasi pajak modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Hal ini terlihat dari besarnya t hitung lebih besar dari t tabel ($2.5796 > 2.1788$)

Besarnya pengaruh *master file* terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I, dengan menggunakan analisis path, dapat dilihat dari 3 (tiga) jalur. Yaitu (1) besarnya pengaruh langsung *master file* (X_1) terhadap penerimaan pajak (Y) adalah sebesar 19,95% dan (2) pengaruh tidak langsung *master file* (X_1) terhadap penerimaan pajak (Y) yang melalui struktur organisasi (X_2) sebesar 9,61% serta (3) pengaruh tidak langsung *master file* (X_1) terhadap penerimaan pajak (Y) yang melalui prosedur perpajakan (X_3) sebesar 6,11%. Total pengaruh *master file* (X_1) terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah 35,67% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik *master file* akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh M Zain (1991), James & Alley (1999) bahwa penyusunan daftar wajib pajak (*master file*) merupakan sesuatu hal yang mutlak dan penting dimiliki serta merupakan prioritas utama dari program dasar instansi perpajakan. Karena tanpa ada daftar wajib pajak tersebut maka tidak ada jaminan akan efektifnya pelaksanaan perpajakan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Struktur organisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan. Berdasarkan analisis path dapat dilihat pengaruh struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I melalui 3 jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kontribusi langsung struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah sebesar 15,57% dan (2) pengaruh tidak langsung struktur organisasi terhadap penerimaan pajak yang melalui *master file* sebesar 9,61% serta (3) yang melalui prosedur perpajakan sebesar 1,16%. Total pengaruh struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah 26,35% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik struktur organisasi akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern struktur organisasi dirancang berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas dan tidak menimbulkan duplikasi antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan banding, serta penyidikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak karena tanggung jawab dan wewenang dari administrasi pajak menjadi jelas.

Dalam administrasi perpajakan modern juga diterapkan adanya *Account Representative (AR)* yang berfungsi khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. Dengan pembagian tugas disesuaikan dengan kelompok usaha Wajib Pajak, *Account Representative* memiliki pemahaman tentang bisnis dan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Penunjukkan *Account Representative* dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan ekses negatif.

Monitoring wajib pajak dilakukan melalui Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahan yang terjadi terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Transparansi pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak didukung dengan *Taxpayers' Account* telah memudahkan pengawasan atas hak dan kewajiban perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak. Selanjutnya, monitoring pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan aparat pajak dilaksanakan dengan memberikan sanksi dan hukuman telah berjalan dengan baik.

Dapat dilihat bahwa kontribusi langsung prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah sebesar 10,48% dan pengaruh tidak langsung prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak yang melalui *master file* sebesar 6,11% serta yang melalui struktur organisasi sebesar 1,16%. Total pengaruh prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I adalah 17,75% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik prosedur perpajakan akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dimana telah dilakukan penyederhanaan prosedur perpajakan yang didukung oleh teknologi informasi.

Penyederhanaan prosedur perpajakan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak. Kegiatan yang dilakukan antara lain (i) menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT), (ii) mempercepat proses penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak, (iii) pengukuhan Wajib Pajak Patuh untuk mempercepat permohonan restitusi, (iv) meninjau kriteria Wajib Pajak Pungut untuk mengurangi permohonan restitusi, (v) meninjau kembali kewajiban pemeriksaan atas setiap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) dan mempercepat restitusi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) yang beresiko rendah, (vi) pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sedangkan teknologi informasi telah berubah dengan menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). SAPT terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur administrasi yang telah diatur dalam *case management* dan *workflow system* didukung *e-system*, terutama *e-Payment*, *e-SPT*, dan *e-filing* yang membantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses perekaman data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagan *E-Payment*, *E-SPT*, dan *E-Filing*. Dengan SAPT dapat mempercepat proses pelayanan, proses pemeriksaan dan memudahkan pengisian formulir pajak. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dan kuantitas pelayanan kepada wajib pajak.

Satu hal yang menjadi catatan dari pelaksanaan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern adalah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana. Walaupun secara keseluruhan fasilitas yang digunakan telah tersedia, Namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan di setiap KPP yang termasuk dalam Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta I masih perlu ditingkatkan lagi, terlihat hanya 55,1% responden cenderung menyatakan memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi kerusakan dari fasilitas yang tersedia akan memungkinkan terganggunya pelaksanaan perpajakan yang signifikan karena kurangnya cadangan yang menunjang fasilitas yang digunakan.

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan dalam administrasi pajak modern secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dilakukan melalui statistik uji F. Berdasarkan hasil yang diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($15,770 > 3,4903$) sehingga *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan dalam administrasi pajak modern secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I.

Besar pengaruh *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi yaitu 0,7977. Jadi diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini 79,77% penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dipengaruhi oleh *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 20,23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Tingkat efektifitas penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, prosedur perpajakan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan di setiap KPP yang termasuk dalam Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta I diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*) termasuk dalam kategori efektif
 - b. Struktur organisasi di setiap KPP dalam lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta I termasuk kategori efektif
 - c. Prosedur perpajakan di Kantor Wilayah DJP Jakarta I berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan menunjukkan hasil yang efektif
2. Pengaruh secara parsial penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I diperoleh hasil sebagai berikut
 - a. Master file dalam administrasi pajak modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Besarnya pengaruh *master file* terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I sebesar 35,67% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik *master file* di Kantor Wilayah DJP Jakarta I maka akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 - b. Struktur organisasi dalam administrasi pajak modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Besarnya pengaruh struktur organisasi terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta sebesar 26,35% , dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik struktur organisasi akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
 - c. Prosedur perpajakan dalam administrasi pajak modern berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Besarnya pengaruh prosedur perpajakan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta 17,75% dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik prosedur perpajakan akan menjadikan semakin tinggi penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I
3. Penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi, dan prosedur perpajakan dalam administrasi perpajakan modern berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Besar pengaruh *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I sebesar 79,77%. Hal ini berarti bahwa sebesar 79,77% penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta I dipengaruhi oleh *master file*, struktur organisasi dan prosedur perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 20,23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Saran

1. Perlunya ditingkatkan kembali dalam pemberian pelatihan teknis bagi aparat pajak untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi aparat pajak dalam melaksanakan fungsi perpajakannya. Hal ini harus disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan usaha wajib pajak sehingga diharapkan tercipta konsistensi profesionalisme dalam pelaksanaan perpajakan oleh aparat pajak.
2. Melihat hasil penelitian secara simultan bahwa penyusunan dan penggunaan daftar wajib pajak (*master file*), struktur organisasi dan prosedur perpajakan berpengaruh

sebesar 79,77% dan sisanya sebesar 20,23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Dengan demikian untuk mengoptimalkan penerimaan pajak diharapkan pula faktor lain lebih diperhatikan diantaranya sosial, budaya dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap, 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia : Perspektif Ekonomi – Politik.. Integrita Dinamika Press.
- Azwar, Saifuddin. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bird, Richard, M. dan M. Casanegra de Jantscher, 1992. *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington D.C: International Monetary Fund
- Boskin, Michael, 1996. *Frointer Tax Reform*. Stanford: Hoover Institution Press
- Caiden, Gerald E. 1991. *Public Administrative*. Second Edition. California: Palisades Publisher
- Departemen Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 587/KMK.01/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- . Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 269/KMK.03/2004 Tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan untuk Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
- Eke, Aiseke. 2001. *Paper and Report of Tax Policy and Administration, 2001 Tax Conference*. Tokyo: Asian Development Bank Institute
- Erly Suandi, 2003. Perencanaan Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi, Prof. Dr., 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Gunadi, Prof. Dr. 2005. Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang Undang Pajak Baru. Edisi 9. Jakarta, PT Grasindo.
- Mansury R., 1992. *The Indonesian Income Tax, A case study in tax Reform*, Rotterdam, Erasmus University.
- M. Sudradjat, 2002. Metode Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Jatinangor UNPAD
- Nasucha, Chaizi, Dr., 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pakpahan, Robert. “Kantor Pelayanan Pajak Percontohan.” Dalam buku *Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa, Jakarta: JICA dan DJP, 2004